

96/00581

PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT DARI PEMBANGUNAN INDUSTRI DI PEDESAAN



Oleh:
Sambas Prabhawa

UNIVERSITAS TERBUKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
JANUARI, 1996

Mengetahui,
Dekan FKIP-UT,

DRS. UDIN S. WINATAPUTRA, MA
NIP. 130 367 151

Jakarta, 9 Januari 1996
Penulis,

OPS. SAMBAS PRABAWA
NIP. 131 467 662

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Akhirnya Studi literatur ini selesaikan juga meskipun mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada kualitas laporan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan penelaahan.

Penulis, pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas perkenan dan petunjukNya sehingga, penulis dapat melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan kewajibannya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lembaga-lembaga kepustakaan yang memberikan berbagai informasi dalam mencari sumber penulisan. Selain itu kepada Dekan FKIP-UT yang telah menyetujui dan mengetahui dalam penyelesaian penulisan studi literatur, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu atas segala bantuan dan partisipasi dalam mendukung penulisan ini.

Akhirnya harapan kami tidak lain adalah semoga penulisan kepustakaan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan UT pada khususnya.

Jakarta, Januari 1996
Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Perumusan Masalah | 2 |
| 3. Tujuan Penulisan | 2 |
| 4. Metodologi | 3 |
| BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN PERTANIAN | |
| 1. Zaman Kolonial | 3 |
| 2. Zaman Kemerdekaan | 6 |
| 3. Masa Prapelita | 7 |
| 4. Masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) | 8 |
| 5. Masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) | 12 |
| BAB III. DINAMIKA PEMBANGUNAN INDUSTRI DI PEDESAAN | |
| 1. Pengembangan Industri Pedesaan | 15 |
| 2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan | 17 |
| BAB IV. PROSES PERUBAHAN SOSIAL DI PEDESAAN | |
| 1. Pengertian | 19 |
| 2. Faktor Penyebab Perubahan | 21 |
| a. Ekonomi Moral Petani | 21 |
| b. Ekonomi Politik Petani | 22 |
| BAB V. PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT DARI PEMBANGUNAN INDUSTRI DI PEDESAAN | |
| 1. Pengaruh Terhadap Kesempatan Kerja | 23 |
| 2. Pengaruh Terhadap Pendidikan | 26 |
| BAB VI. PENUTUP | 28 |
| DAFTAR PUSTAKA | 31 |

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Strategi pembangunan pada PJP II dititikberatkan pada pengembangan bidang ekonomi dimana sektor industri menjadi tumpuan utama. Sasaran utama PJP II dibidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi bercirikan industri yang maju, terutama industri yang terkait secara efektif dan efisien dengan pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, serta kemakmuran rakyat yang semakin meningkat dan merata.

Pengarahan pada PJP II tersebut mengandung arti perlunya saling ketergantungan antara sektor pertanian dan sektor industri yang mencerminkan adanya tanggungjawab masing-masing sektor dalam menuju sasaran yang ingin dicapai. Saling ketergantungan antara sektor pertanian dan sektor industri dapat dilihat bahwa sektor industri membutuhkan bahan baku untuk diproses produksi yang berasal dari sektor pertanian.

Tujuan pembangunan industri tidak hanya membangun pabrik tetapi membangun masyarakat industri dalam arti yang luas, melalui partisipasi masyarakat dalam membangun industri dasar, aneka industri serta industri kecil (Hartarto, 1991).

Berdasarkan laporan tahunan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (1993a), angkatan kerja pada akhir Repelita V diperkirakan sebanyak 86,4 juta, sedangkan lapangan kerja yang tersedia sebanyak 83,7 juta, sehingga terdapat pengangguran sebesar 2,7 juta, sebagai akibat terbatasnya kesempatan kerja disektor pertanian dan tidak tertampungnya tenaga kerja di sektor industri.

Masuknya industri di pedesaan baik dalam unit-unit kecil dan rumah tangga maupun pabrik besar, baik industri yang padat modal maupun pabrik industri padat karya, akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya positif seperti

peningkatan kemampuan atau ketrampilan, penguasaan teknologi dan sebagainya, maupun dampak negatif misalnya, terjadinya berbagai konflik, perbedaan tingkat pendapatan antara orang dalam proyek atau antara penduduk asli dengan pendatang dan sebagainya.

Bila kita lihat dampaknya terhadap ketenagakerjaan, maka otomatis diharapkan dengan adanya industri di desa akan membuka kesempatan kerja bagi sebagian penduduk desa yang makin lama makin berpindah dari sektor pertanian ke non pertanian karena berbagai sebab. Dan akan mampu meningkatkan pendapatan mereka yang bekerja di industri tersebut dan bagi penduduk setempat/wilayah setempat, dimana hal ini tidak terlepas dari tingkat upah yang akan mereka terima.

Peningkatan kemampuan atau ketrampilan bagi tenaga kerja juga akan terjadi, untuk itu biasanya suatu industri membutuhkan ketrampilan tertentu atau akan membuat terampil tenaga kerjanya pada tingkatan tertentu. Demikian juga akhir-akhir ini petani cenderung menyekolahkan anaknya untuk dapat bekerja di luar pertanian, yang diyakininya akan meningkatkan kehidupan mereka kelak, dalam hal ini termasuk kerja di sektor industri. Sehingga otomatis industri juga akan mempengaruhi pendidikan.

2. Perumusan Masalah

Setelah latar belakang di atas, masalah yang akan menjadi focus perhatian pada tulisan ini adalah, sampai dimanakah perubahan sosial berkaitan dengan perkembangan industri yang menunjang perhatian selama ini? dan, apakah pembangunan industri di pedesaan memberi dampak terhadap kesempatan kerja dan pendidikan?

3. Tujuan Penulisan

Studi pustaka ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kontribusi Industri terhadap perkembangan pertanian di Indonesia.

- b. Mengetahui perubahan sosial yang terjadi akibat pembangunan industri di pedesaan, khususnya terhadap kesempatan kerja dan pendidikan.

4. Metodologi

Penulisan Studi Pustaka ini didasarkan pada telaahan terhadap beberapa data sekunder, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang ada.

BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN PERTANIAN

1. Zaman Kolonial

Pada dasarnya pertanian Indonesia sudah merupakan bagian dari hidup, bahkan suatu "cara hidup" (*way of life*) rakyat Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Sehingga perkembangannya tidak dapat dibatasi awal dan akhirnya. Namun akan dicoba melihatnya dari sejak masa terjadinya kolonialisme di Indonesia.

Permulaan zaman penjajahan, tujuan utama adalah Maluku dengan rempah-rempahnya yang terkenal. Namun Belanda segera tertarik ke Jawa sebagai pusat persawahan dan tempat pertama menumpangkan perekonomian kolonial mereka. Demikian pola ekologi ini secara keseluruhan sudah boleh dikatakan tetap, diluar Jawa yang lebih terkenal dengan sebutan Indonesia luar, berkembang terutama dari hutan tropis yang sangat luas.

Kemudian Geertz (1974) mengatakan, Belanda yang berorientasi pada ekspor dunia tidak lagi memakai tanah dan tenaga kerja untuk mengusahakan padi dan makanan domestik tetapi untuk perkebunan dan tanaman perdagangan lainnya, dimana tanaman utama saat itu adalah kopi dan tebu. Yang boleh dikatakan mendukung seluruh ekonomi kolonial, dan mencapai jumlah sampai 1/4 dan 1/3 dari pendapatan ekspor Hindia Belanda.

Nilai tersebut didapat dengan mencoba menerapkan berbagai sistem dalam mengusahakan pertanian guna mendapat keuntungan yang

sebesar-besarnya. Dari mencoba menetapkan pajak, sistem tanam paksa, perkebunan besar, yang kesemuanya sebenarnya hampir sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Pada saat itu industri sudah mempunyai peranan, yang dipelopori kopi sampai kira-kira tahun 1880 dan oleh gula selama perempat terakhir abad 19-20.

Tidak hanya di pulau Jawa, setelah pemerintah Hindia Belanda mengetahui potensi Sumatera yang begitu bagus dalam pengembangan perkebunan, mencoba juga membuat industri tembakau, karet, kelapa sawit dan teh, disamping produksi tanaman-tanaman lain yang juga sangat bagus untuk di ekspor (Pelzer, 1985).

Pemerintah Belanda yang mengusahakan perkebunan secara besar-besaran, memakai tenaga kerja untuk tanaman tebu sama dengan padi, karena sistem tanamannya bergilir. Sedangkan untuk kopi dibuat kantong-kantong perkebunan tetap, yang menampung tenaga kerja dari luar daerah, seperti halnya di Sumatera, tenaga kerjanya didatangkan dari pulau Jawa.

Sehingga saat itu, tidak ada kondisi yang menunjang peningkatan pendidikan bagi rakyat pribumi. Dimana tenaga ahli didatangkan dari luar, sedang untuk buruh kasar dari rakyat pribumi tanpa mentransfer pengetahuan. Ada pun pendidikan pada saat itu dibangun, hanya dirasakan oleh golongan atas yang menguntungkan pemerintah kolonial. Pembangunan sekolah juga dilakukan untuk kegiatan politik seperti yang terlihat di Aceh, adalah untuk meredam kebencian terhadap kafir, sehingga diupayakan pembangunan sekolah untuk membuat masyarakat senang. Namun sejauh itu, sekolah ini pun tidak berpengaruh banyak bagi masyarakat setempat (Reid, 1987).

Dilihat dari hasil produksi dan keuntungannya, sistem kolonial dalam mengembangkan pertanian ini sangat berhasil, karena mendapatkan keuntungan dari ekonomi ekstern yang diciptakan dengan pembentukan modal sosial, penyebaran secara paksa tanaman perkebunan beserta ketrampilan kerja (yang rendah) keseluruh Indonesia. Sehingga makin diupayakan perkembangan

lembaga perdagangan Belanda dan merintangi lembaga perdagangan Belanda dan merintangi lembaga perdagangan Indonesia.

Yang melahirkan ekonomi kolonial dari perkawinan ekonomi politik. Oleh Boeke (1973), disebut sebagai ekonomi dualistis. Dimana hasil produksi massa industri Barat yang baru membanjiri pasaran Timur, menghapus kerajinan dan perniagaan rakyat pribumi.

Akhirnya pada periode masa ekonomi kolonial berikutnya (1930-1942), krisis dunia yang dimulai 1929 menimpa pula Indonesia. Di sektor modern, baik perkebunan, tambang, industri, perdagangan, dan perbankan yang berkembang saat itu untuk mendukung kegiatan perusahaan kapitalis, terpaksa harus memecat atau memberhentikan pegawai-pegawainya. Perusahaan-perusahaan yang terletak di luar Jawa bahkan mengembalikan sebagian buruhnya ke Jawa. Penghematan secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah kolonial dan kemandegan dalam sektor modern, menyebabkan kegiatan penduduk terdesak kembali ke sektor pertanian dan berkurangnya penggunaan uang.

Setelah krisis berakhir, berbagai perubahan terjadi dalam kebijaksanaan ekonomi kolonial, seperti peningkatan hasil bahan makanan, perluasan pemindahan penduduk, memajukan industri dan kerajinan, mulai mengikutsertakan tenaga-tenaga Indonesia dalam dunia usaha industri dan perdagangan. Demikian juga dengan pertanian, makin membaik perkembangannya.

Namun semua kebijaksanaan tersebut terbenam dalam kancan Perang Dunia II, dan Indonesia dalam masa tiga-setengah tahun berada di bawah pemerintahan Jepang, dimana jutaan rakyat menjalankan kerja paksa "Romusha". Reid (1987) mengatakan, bahwa pada saat itu politik ekonomi Jepang terpaksa mengadakan perubahan besar yang menyeluruh pada tahun 1943 ke arah swasembada, mencukupi kebutuhan sendiri pada masing-masing provinsi. Sementara perkebunan-perkebunan yang luas di Sumatera Timur, yang menjadi tujuan peperangan menjadi tidak berguna.

Dalam periode ini tidak ada yang dapat disampaikan tentang pembangunan ekonomi, baik di wilayah Jawa dan luar Jawa. Hanya

penderitaan rakyat yang semakin berat sampai akhirnya berjuang mencapai Indonesia merdeka.

2. Zaman Kemerdekaan

Penyerahan kedaulatan, pemolitikan masyarakat secara menyeluruh, dan kemenangan nasionalisme yang radikal di Indonesia masih menampilkan perekonomian yang berfungsi kurang efektif. Akan tetapi dalam batas-batas kerangka umum ini, banyak juga perubahan yang telah terjadi, baik dalam perkembangan ekonomi dan pertanian. Kecuali yang bersangkutan dengan minyak bumi, orang-orang Eropa memainkan peranan yang lebih kecil dalam sektor padat modal dari ekonomi rangkap atau oleh Boeke disebut sebagai *ekonomi dualistik*.

Dimana pada tahun 1947 lahir Panitia pemikir Siasat Ekonomi, yang akan meletakkan dasar dan menyusun perencanaan ekonomi Indonesia. Panitia ini tidak sempat lama bekerja, situasi tidak mengijinkan, namun masih sempat merumuskan strategi dasar tentang prioritas pembangunan, sumber-sumber pembiayaan, sarana-sarana yang akan dicapai dan khusus untuk tingkat upah, upah minimum dihitung atas dasar ongkos hidup sekeluarga berdasar harga beras.

Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia juga berusaha memperbaiki dan mencoba dengan metode sendiri guna mengurus rumah tangganya. Sehingga pada tahun 1955, Departemen Pertanian yang telah dibentuk saat itu, telah meletakkan dasar bagi intensifikasi untuk meningkatkan produksi pangan. Untuk menanganinya, pada tahun 1958 didirikan suatu organisasi yang dikenal dengan "padi centra" yang mensuplai petani dengan bibit dan pupuk serta sedikit uang untuk biaya operasi. Namun secara umum usaha tersebut tidak berhasil banyak dalam rangka pembangunan pertanian.

Ketidak berhasilan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh banyaknya pergolakan saat itu. Pergolakan-pergolakan politik tersebut menyebabkan sektor perekonomian menjadi kurang mendapat perhatian, termasuk di dalamnya usaha peningkatan pembangunan

dalam sektor perhatian yang seharusnya menjadi landasan bagi pembangunan selanjutnya, demikian juga untuk industri kurang berkembang.

3. Masa Prapelita

Selama perekonomian diabaikan, sumber kekayaan dalam dan luar negeri diboroskan. Akibat langsung dari hal ini adalah kemerosotan ekonomi yang dibarengi dengan proses hyper inflasi yang semakin gawat. Dimana pada tahun 50-an kegiatan perencanaan pembangunan kembali mendapat perhatian. Lahirnya orde Baru saat itu diharapkan akan mendobrak salah urus dalam segala bidang terutama dalam bidang ekonomi yang diwariskan Orde Lama.

Garis-garis Besar Haluan Pembangunan untuk pertama kali dapat disusun pada tahun 1954, dalam usaha mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Lima Tahun (1956-1960). menjelang pelaksanaan rencana pembangunan itu, diperkirakan penduduk Indonesia berjumlah sekitar 82,5 juta jiwa dan dianggap tingkat pertumbuhannya sekitar 1,7%, sedangkan untuk masa 1956-1960, pendapatan nasional diharapkan meningkat 3% per tahun.

Sementara penduduk pulau Jawa yang terus bertambah dan semakin padat, mengakibatkan tingkat hidup rendah. Oleh karena itu, perlu transmigrasi dan perluasan kesempatan kerja melalui industrialisasi, khususnya untuk tenaga kerja yang menganggur. Pada periode itu, pendapatan domestik bruto Indonesia tumbuh sekitar 15,4%, sedang penduduk meningkat 15%. Ini berarti pendapatan per kapita penduduk meningkat sekitar 0,4% dalam waktu 8 tahun.

Karena sasaran jangka panjang yang saat itu disusun, berusaha mengendalikan inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pencukupan kebutuhan sandang. Garis kebijaksanaan yang diambil adalah menciptakan iklim dekontrol dan bebiroktatisasi, sehingga memungkinkan berkembangnya daya kreasi masyarakat secara optimasi.

Diakhir tahun 1960-an pembangunan pertanian di Indonesia dicirikan dengan Revolusi Hijau, yang dirintis IPB lebih dahulu di Jawa dengan pelayanan penyuluhan pertanian, dan bibit unggul. Tidak hanya itu, bahkan pada tahun 1967 berbagai program swasembada beras yang telah dirintis pemerintah, mendapat picu dalam bentuk ketersediaan faktor revolusi biologi berupa bibit padi varietas unggul, revolusi kimiawi berupa macam-macam pupuk buatan serta obat-obatan anti hama, dan usaha pemerintah membuat rakyat lebih tenang.

Pada tahun 1968 pemerintah Orde baru mencanangkan Program Bimas (Bimbingan Massa), yang mempromosikan penggunaan meluas bibit unggul, pupuk buatan, pestisida, insektisida, kredit dan tenaga murah petani sebagai modal serta lahan sawah beririgasi.

Namun akan halnya dalam industrialisasi memasuki lembaran baru pada periode tersebut, dengan lahirnya Undang-undang pokok Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-undang Pokok Dalam Negeri pada tahun 1968. Saat itu sektor industri telah mulai maju dimana investasi pada sektor ini pun makin meningkat, meliputi berbagai jenis industri seperti makanan, tekstil, kayu kertas, kimia mineral, non-logam, logam dasar, barang-barang logam dan lain-lain. Ini tidak terlepas dari pengendalian pemerintah atas kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian awal tahun 60-an.

4. Masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I)

Setelah tercapai landasan yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan disusunlah Rencana Pembangunan Lima Tahun yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak, yang sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya, dengan berusaha keras melakukan perbaikan-perbaikan.

Pembangunan Indonesia diawali dengan titik berat pada sektor pertanian, karena didasarkan pada strategi pembangunan untuk mendobrak keterbelakangan ekonomi kita melalui proses

pembaharuan di bidang pertanian. Sektor ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, sejak masa kolonialisme. Penjajah bahkan menumpangkan perekonomiannya sepenuhnya pada hasil pertanian Indonesia yang memang berkualitas tinggi, dan sudah mulai dikenal oleh negara lain. Sehingga untuk selanjutnya sudah sepatutnya menjadikan pertanian sebagai titik berat bagi pembangunan kita.

Pada PJPT I, di empat Pelita pertama titik berat pembangunan ekonomi diletakkan pada sektor pertanian, sementara industri berevolusi dari sektor yang mendukung pertanian sampai mencapai tingkat lebih mapan dengan menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dalam Pelita V diupayakan mencapai struktur ekonomi yang lebih berimbang, dengan mendasarkan pada kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Pola Umum Pembangunan jangka panjang disusun guna mengarahkan dan menyatukan langkah dalam pembinaan dan pembangunan bangsa. Dengan sasaran utama adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Disamping itu, masalah kesempatan kerja turut dipikirkan dengan penanganan secara terpadu diberbagai bidang. Di sektor industri juga dibuat kebijaksanaan pokok perluasan lapangan kerja produktif, yang berarti mendukung pembukaan kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia, baik di industri kecil, sedang dan besar.

Perkembangan ekonomi yang mencakup pertanian dan juga industri mengalami masa-masa naik dan turun. Masa awal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada PJPT I, mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dimasa oil boom (1970-1981). Dua strategi pembangunan jangka panjang telah diadopsi dan diimplementasikan, yakni; intensifikasi padi dan industrialisasi berdasarkan strategi substitusi barang impor. Bahkan diperkirakan juga saat itu pendapatan turut meningkat.

Namun setelah 1981, harga minyak menjadi menurun berarti juga mempengaruhi pendapatan negara dari ekspor, dan mempengaruhi pembelanjaan pemerintah dan impor. Memaksa pemerintah untuk membuat penyesuaian ekonomi melalui kebijakan keuangan dan fiskal. Sedang untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu usaha diversifikasi ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dalam hal ini industrialisasi berperan didalamnya, sebagai hasilnya investasi dan ekspor komoditi non-minyak meningkat secara nyata.

Prestasi ini ditingkatkan kembali dengan tercapainya swasembada pangan tahun 1984. Selama periode tersebut, pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan produksi hasil-hasil pertanian terutama produksi pangan khususnya padi melalui berbagai usaha perluasan areal panen, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produktivitas petani serta perluasan pelaksanaan kegiatan intensifikasi Bimas dan Inmas yang sudah diintroduksi sejak tahun 1969.

Juga diarahkan pada peningkatan bahan ekspor dan bahan-bahan kebutuhan industri, serta pemerataan penyebaran hasil-hasil pembangunan dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan pendapatan petani. Sumbangan pertanian pada total Produk Domestik Bruto (PDB) samapai pada tahun 1986 mencapai 24,22%, dan merupakan yang terbesar terhadap dasar harga.

Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas dasar Harga berlaku menurut Sektor Pertanian dan Non-pertanian di Indonesia (1986-1991)

| Sektor | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Pertanian | 24.22 | 23.33 | 24.12 | 23.43 | 21.40 | 19.47 |
| - Tan. Bahan Makanan | 14.69 | 14.05 | 14.86 | 14.65 | 13.16 | 11.37 |
| - Tanaman Perkebunan rakyat | 3.45 | 3.32 | 3.09 | 2.81 | 2.51 | 2.41 |
| - Tanaman Perkebunan Besar | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.87 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Peternakan+hasilnya | 2.57 | 2.42 | 2.49 | 2.28 | 2.22 | 2.22 |
| - Kehutanan | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.88 |
| - Perikanan | 1.87 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.70 | 1.67 |
| 2. Non Pertanian | 75.78 | 76.67 | 75.88 | 76.57 | 78.60 | 80.53 |
| <hr/> | | | | | | |
| PDB (Ribuan Milyar) | 102.68 | 121.82 | 142.10 | 167.18 | 196.92 | 227.16 |
| (Persen) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) |

Sumber: Biro Pusat Statistik, Pendapatan Nasional Indonesia, 1993

Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap tahun sumbangan pertanian terhadap total Produk Domestik Bruto semakin menurun. Mulai dari 24,22% pada tahun 1986 berkurang terus sampai menjadi 19,47% pada tahun 1991. Sedangkan untuk non pertanian dimana termasuk pertambangan, industri, listrik, bangunan transportasi, perdagangan, jasa dan lain-lainnya, setiap tahun semakin meningkat.

Berarti bahwa untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tidak dapat hanya mengandalkan pertanian saja. Bahkan para ahli ekonomi pembangunan telah menyadari pentingnya sektor non-pertanian sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok besar masyarakat pedesaan khususnya kelompok buruh tani dan petani sempit (Mubyarto, 1985). Bila pun kita menitik beratkan pada pertanian, namun kita harus menunjangnya dengan sektor non pertanian yang jelas-jelas sumbangannya semakin meningkat pada PDB.

Untuk sektor pertanian, terlihat sub sektor tanaman bahan makanan sejak 1986, memberi sumbangan yang terbesar. Dimana sumbangannya berkisar di atas 10% setiap tahunnya sampai data terakhir 1991. Sementara sub sektor lain malah berada di bawah 5% pertahunnya. Hal ini dapat dimaklumi di mana pada awal pembangunan senantiasa mengarahkan pembangunan pertanian pada peningkatan produksi pangan khususnya padi, yang membawa swasembada pangan pada tahun 1984, dan tahun-tahun selanjutnya adalah upaya mempertahankannya.

Walaupun sumbangan pertanian semakin menurun namun tidak dapat dipungkiri sektor pertanian masih merupakan salah satu

sektor yang menampung sebagian besar tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas yang relatif sangat rendah. Sektor ini mayoritas bersifat tradisional dan tingkat pendidikan tenaga kerjanya pun relatif tertinggal. Kondisi ini banyak dialami negara berkembang, dimana keadaan struktur kegiatan ekonominya senjang. Karena disatu pihak sektor pertanian dengan tingkat setengah pengangguran yang relatif tinggi, dan tingkat pendapatan pekerja yang relatif rendah, sedangkan di pihak lain, sektor modern dengan teknologi yang relatif modern tingkat upah relatif tinggi.

Bahkan bila kita melihat tenaga kerja di sektor pertanian, maka dapat dilihat bahwa semakin kecil tenaga kerja pada sektor ini. Sebagian tenaga kerja yang tadinya atau seharusnya bekerja di bidang pertanian tergeser ke sektor lain (Raharjo, 1984). Sebagaimana yang dikatakan Kuznets, sejalan dengan proses industrialisasi, para petani akan makin meninggalkan pekerjaan agrarisnya menuju ke sektor industri atau jasa di kota. Pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian ini akibat bekerjanya daya pendorong (*push faktor*) dan daya penarik (*pull faktor*).

5. Masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II)

Setelah PJPT I berakhir, di mana pembangunan telah dijalankan selama 25 tahun, perubahan-perubahan telah terjadi di berbagai aspek. Prestasi yang dicapai Indonesia dalam hal ini turut mempercepat perubahan. Di sektor pertanian prestasi nyata yang tercapai adalah swasembada beras. Indonesia berubah dari status negara pengimpor beras ke negara yang mampu mencukupi kebutuhan beras penduduknya, bahkan mampu mengekspor. Lebih dari itu, Indonesia kemudian memperoleh penghargaan dari PBB. Menyebabkan terjadinya perubahan produksi, ekonomi bahkan perubahan sosial (Salman, 1995).

Seperti yang sudah digambarkan di atas, lebih dari itu, perubahan nampak juga dari adanya transformasi dari pertanian ke non pertanian, baik dari sumbangannya terhadap PDB maupun

kesempatan kerjanya. Dalam memasuki masa PJPT II, banyak harapan yang dibuat dan dirumuskan melalui strategi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup.

Maka strategi pembangunan pada PJPT II dititikberatkan pada pengembangan bidang ekonomi di mana sektor industri menjadi tumpuan utama yang lebih kuat dari pertanian. Sedang sasaran utamanya dibidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi bercirikan industri maju, terutama industri yang terkait secara efektif dan efisien dengan pertanian yang tangguh, Koperasi yang sehat dan kuat, perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, serta kemakmuran rakyat yang semakin meningkat dan merata.

Apabila hanya mempertahankan sektor pertanian sebagai sektor utama dalam mengajar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, walaupun strategis akan tetap sukar dipertahankan karena sifat komoditi pertanian itu sendiri yang kurang elastis dan resiko ketergantungan pada iklim dan hama penyakit besar sekali.

Sehingga titikberat Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II ini mengandung arti akan perlunya saling ketergantungan antara sektor pertanian dan industri, mencerminkan adanya tanggung jawab masing-masing sektor dalam menuju sasaran yang ingin dicapai. Peningkatan sektor pertanian diharapkan melalui dukungan sektor industri dan sektor lain yang terkait, sebaliknya bila pertanian mengalami penurunan, maka industri dan sektor terkait diharapkan dapat membantu.

Seperti pertanian saat ini, dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau beras mengalami penurunan, dimana swasembada yang sudah pernah dicapai seperti ini tidak dapat dipertahankan, dan sekarang kita harus mengimpor beras. Banyak yang mempertahankan mengapa hal tersebut dapat terjadi, apakah karena disebabkan transformasi yang terjadi dari pertanian ke non pertanian, dan apa yang menyebabkan transformasi tersebut?, tidak dapat dijelaskan bila hanya melihat dari satu sisi saja. Karena berbagai aspek saling mempengaruhi.

Sesungguhnya telah disadari bahwa PJPT II ini akan merupakan era yang sangat menentukan bagi bangsa dan rakyat Indonesia dalam mensukseskan pembangunan di masa yang akan datang, dimana kita sedang menuju pada globalisasi perdagangan. Untuk itu saling ketergantungan antara sektor pertanian dan industri perlu semakin ditingkatkan.

Dampak langsung dari fenomena tersebut berkaitan dengan upaya untuk menciptakan pasar yang lebih bebas bagi komoditas-komoditas yang diperdagangkan secara internasional termasuk komoditas pertanian. Kondisi ini ditambahkan dengan makin terintegrasinya kegiatan ekonomi desa-kota serta modern-tradisional akan memberikan dampak yang luas terhadap kegiatan pertanian.

Sehingga untuk mengantisipasi dan menghadapi era globalisasi dalam perkembangan ekonomi dunia, maka upaya untuk mendorong dan meningkatkan industri harus terus kita lakukan karena perkembangan industri tersebut akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap pemerataan pembangunan, penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa dan sebagainya, yang diharapkan pada gilirannya akan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada masa yang akan datang. Dalam industri, peranan non migas semakin nyata didukung iklim usaha yang kondusif serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat (Aribowo, 1992). Lebih lanjut dikatakannya, pengembangan industri terus didorong pemerataannya ke seluruh wilayah Indonesia sesuai potensi daerah.

Melalui perkembangan industri ke pedesaan maka akan menyebabkan perubahan pada perekonomian juga perubahan pada sosialnya, diharapkan lebih pada perubahan yang membuat desa semakin baik. Walaupun tidak dapat disangkal akan ada pengaruh negatifnya, namun diupayakan seminim mungkin. Dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan rakyat dengan adanya kesempatan bekerja dan melalui upaya ini, juga diharapkan akan merangsang

peningkatan pendidikan, yang akan semakin dibutuhkan untuk memasuki sektor non pertanian yang diminati.

BAB III. DINAMIKA PEMBANGUNAN INDUSTRI DI PEDESAAN

1. Pengembangan Industri Pedesaan

Potensi setiap daerah di Indonesia tidak dapat dikatakan sama, walaupun ada yang hampir sama tetap memiliki sumber keuntungan yang berbeda. Bila sebagian besar potensi daerah terletak di sektor pertanian, maka seharusnya dalam pengembangan daerah mengaitkan setiap kebijaksanaan dengan pengembangan pertanian. Karena tidak dapat disangkal pertanian akan tetap menjadi basis perekonomian kita.

Perkembangan pembangunan dan perekonomian suatu daerah tidak pernah ditunjang oleh hanya satu faktor, tetapi oleh beberapa faktor yang saling mendukung dan menguatkan. Di desa, disamping bertani sebagai sumber penghidupan, sejak dulu sudah ada bentuk industri di desa yang turut menopang perekonomian.

Di antara bentuk industri pedesaan yang sejak lama berkembang di desa ada yang penghasil input alat pertanian (cangkul, bajak, parang dari pandai besi) atau alat transportasi (kereta, perahu), dan pernah pula terdapat industri tenun bahan tekstil lokal di daerah tertentu. Ada pula industri desa lain memakai bahan dari lingkungan fisik setempat: tanah liat untuk bata dan genteng, dimana industri desa tersebut diklasifikasikan dalam industri rumah tangga (mikro, tanpa buruh upahan) dan industri kecil (Sayogyo, 1990).

Pada jaman dahulu pada beberapa pulau telah terdapat industri di desa. Seperti di Jawa menurut Geertz (1974), terdapat industri rumah kecil-kecilan, di Madura menurut Huub de Joge (1989), mencakup usaha menganyam keranjang dan tikar, membuat mebel, peralatan dapur, pot, tembikar, memeras minyak, dan menempa besi. Yang dilakukan oleh kaum pria, kaum wanita maupun

oleh anak-anak. Sedangkan di Sumatera tidak berbeda, terdapat usaha anyam-anyaman, tenunan, peralatan dari pandai besi dan lain-lain.

Menurut pemikiran sebagian orang usaha seperti itu tidak lebih dari sekedar pengisi waktu luang, menunggu sebelum kerja yang sebenarnya. Padahal industri ini pada dasarnya dapat memperluas lapangan kerja, membuka kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian, keterkaiatan dan ketahanan ekonomi, dan penghasilan devisa. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kehadiran industri kecil dan kerajinan rumah tangga tidak diragukan lagi, bahkan berfungsi sebagai katup pengaman.

Mayoritas industri kecil dan rumah tangga ini merupakan usaha milik keluarga. Dimana kontrol kualitas produksi industri tersebut umumnya masih rendah, dan perangkat usaha yang layak seperti kepekaan bisnis juga belum tumbuh di kalangan pemiliknya. maka perlu diciptakan jalur kelembagaan yang berfungsi membina usaha-usaha kecil tersebut. Hal ini dapat dimulai oleh pemerintah dalam kebijaksanaannya dalam usaha pembinaan dan pengembangan industri. Industri besar dan sedang yang ditangani pemerintah diharapkan berangsur-angsur akan bisa ditangani sendiri dan akan dapat membantu mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Yang pada gilirannya perusahaan swasta lainnya akan turut membina secara alamiah dalam arti hubungan saling menguntungkan.

Pembinaan atas industri rumah tangga dan kecil oleh Departemen Perindustrian misalnya, berupa pengenalan teknologi dan disain lebih unggul maupun cara management baru, juga sistem bapak angkat. Sistem bapak angkat (SBA) mungkin merupakan satu-satunya kebijakan formal di bidang pembinaan industri kecil, dimana yang "kuat/besar membantu yang lemah/kecil". Cara lain yang dapat membina adalah melalui sistem sub-kontrak, yang dinilai lebih berperan penting dalam kontrol kualitas daripada SBA.

Sehingga bila industri dibangun di desa diharapkan akan saling berkaitan dan bahkan dapat meningkatkan industri yang ada di desa, yang pada akhirnya dapat menaikkan pendapatan dan perekonomian desa setempat. Industri besar dan sedang yang bekerjasama dengan industri kecil dan kerajinan terbukti lebih unggul.

2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan

Salah satu kebijaksanaan pengembangan industri nasional yang sudah dituangkan menurut Menteri muda perindustrian Republik Indonesia, Tungki Ariwibowo (1992), adalah untuk mengantisipasi dan menghadapi era globalisasi dalam perkembangan ekonomi dunia. Maka upaya untuk mendorong dan meningkatkan industri harus terus kita lakukan karena perkembangan industri tersebut akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap pemerataan pembangunan, penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa dan sebagainya, yang diharapkan pada gilirannya akan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada masa yang akan datang.

Dalam Trilogi Pembangunan Indonesia, butir-butir pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas merupakan landasan dalam melangkah. Dimana dari ketiga butir ini tidak dapat dikatakan yang satu lebih dari yang lain, dalam penempatan dan pelaksanaannya.

Kontribusi sektor industri semakin besar pada PDB Indonesia, menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektor industri setiap tahunnya sangat tinggi, mencapai 13% melampaui tingkat pertumbuhan rata-rata. Ini dapat dimaklumi karena sepertinya fokus pandangan pembuat kebijaksanaan dan pelaksana pembangunan selalu diarahkan pada industri yang memang cepat menghasilkan keuntungan.

Pertumbuhan ekonomi ini memang tidak hanya dipengaruhi oleh industri, namunsepertinya sejak pemerintah mulai menitik beratkan pembangunan pada sektor industri yang ditunjang oleh pertanian yang tangguh, kita sudah sadar bahwa industri banyak sekali

memberi kontribusi pada pembangunan yang mendorong semua aspek untuk turut berkembang.

Namun kita tidak dapat hanya melihat butir pertumbuhan saja dalam pencapaian stabilitas. Bila hanya mengutamakan tujuan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka aspek tujuan pemerataan tersingkir. Demikian pula sebaliknya, jika tujuan pembangunan yang utama adalah pemerataan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan dapat dicapai (Hasibuan, 1993).

Pemerataan pembangunan sendiri bukanlah sekedar seperti membagi roti dan hasil yang sama persis, tetapi lebih pada pemerataan kesempatan atau peluang secara optimal dengan memperhatikan lingkungan. Program pemerataan dapat ditempuh baik secara sektoral maupun regional yang dilaksanakan secara terpadu.

Industrialisasi sebagai upaya pertumbuhan dan pemerataan guna menjaga stabilitas nasional, sudah diperhitungkan secara matang, karena berbagai aspek yang disebutkan di atas. Pengembangan industri terus didorong pemerataannya keseluruhan wilayah Indonesia sesuai potensi daerah, melalui pertumbuhan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri yang di dalamnya terdapat Zona Industri, kantong industri, kawasan industri dan sentra industri kecil.

Masalah pemerataan pembangunan dapat dijawab dengan menciptakan industri di pedesaan, baik dalam unit-unit kecil dan rumah tangga atau pun dalam pabrik-pabrik besar. Dengan cara maka sebagian tenaga kerja yang menganggur atau pendapatannya kurang, dapat pula memperoleh tambahan penghasilan dari industri pedesaan. Industri semacam ini bukan hanya terbatas pada pengelolaan hasil pertanian, tetapi juga dapat membuat barang-barang atau bahan-bahan input pertanian, seperti industri pembibitan, pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan sebagainya (Raharjo, 1984). Selain hal tersebut di atas, maka masalah migrasi pun sebenarnya telah dapat diatasi, karena yang bermigrasi ke kota umumnya adalah kaum muda yang ingin bekerja

diluar pertanian yang cukup menjanjikan kemudahan dan hidup enak, atau peningkatan taraf hidup.

Bila ada industri di desa, baik besar, sedang atau kecil diharapkan memiliki keterkaitan. Dimana perkembangan industri skala besar pun sebenarnya membutuhkan dukungan dari stuan-satuan usaha kecil yang dapat membuat barang-barang komponen atau suku cadang. Dan makin besar skala produksinya ternyata justru memberi kesempatan timbulnya industri kecil. Yang menurut Dawam Rahardjo seolah-olah industri besar tersebut memecah-mecah sebagian kegiatan produksinya dan menyerahkannya kepada perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil satuan produksinya.

Dasar pemikiran ini mengandung dimensi pemerataan, setidaknya dalam pendapatan yang pemeratakan kesempatan berusaha, baik dilihat secara sosial, regional maupun sektoral.

IV. PROSES PERUBAHAN SOSIAL PEDESAAN

1. Pengertian

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang telah terjadi sejak zaman dahulu, dan akan terus berlangsung. Perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Dapat terjadi secara lambat dinamakan evolusi dan cepat disebut revolusi, juga dapat direncanakan dan tanpa rencana (Soekanto, 1982).

Menurut James C. Scoot, perubahan dan pemberontakan yang terjadi adalah akibat masuknya kelompok pemaksa dari luar yang mengganggu stabilitas. Sedangkan menurut Samuel L. Popkin, perubahan terjadi dari diri sendiri yang berfikir secara rasional karena ingin meningkatkan taraf kehidupan. Mencakup hal tersebut Soekanto mengatakan, perubahan tersebut sumbernya mungkin ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang

letaknya di luar masyarakat itu, yaitu pengaruh dari masyarakat luar. Jadi perubahan tidak hanya dari satu arah saja.

Banyak yang berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan manusia. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Selanjutnya menurut Mac Iver perubahan sosial mencakup perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial tersebut.

Sehingga dalam melakukan pembangunan, pasti akan terjadi perubahan. Perubahan ekonomi yang diharapkan terjadi akan pula mempengaruhi perubahan sosial, karena selalu ada proses saling pengaruh mempengaruhi secara timbal-balik. Perubahan dapat terjadi sebelum dilakukan pembangunan, karena merupakan syarat bagi pembangunan itu sendiri, dan perubahan juga dapat terjadi setelah pembangunan sebagai akibat dan usaha menyesuaikan diri terhadap situasi baru tersebut.

Negara-negara Dunia Ketiga mengalami masalah dalam pembangunan daerah pedesaannya. Menurut Chambers (1983), ini diakibatkan tenaga-tenaga berkeahlian dan sumber-daya tersedot ke kawasan industri yang kaya di perkotaan, dan dari kota-kota kecil ke pusat kota yang lebih besar. Tidak hanya itu bahkan perhatian mereka langsung mengarah pada hal-hal yang bersifat kota, industri, teknologi "tinggi", padat modal, cocok untuk daerah beriklim sedang, serta pemasaran dan ekspor; dengan menelantarkan hal-hal yang bersifat desa, perhatian, teknologi "rendah", padat karya, cocok untuk daerah beriklim panas, yang merupakan kebutuhan langsung konsumsi rumah tangga.

Untuk itu dalam strategi pembangunan desa, dikoordinasikan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dan mempertimbangkan yang menurut Chambers memang diperlukan suatu desa dalam pengembangannya. Strategi ini di

Indonesia dalam program jangka panjang, seluruh desa diharapkan mencapai desa Swasembada, melalui tahapan desa Swadaya-Swakarya dan desa Swasembada Pancasila.

Namun untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan desa tersebut, sistem baru pasti akan masuk. Inovasi akan dimasukkan ke dalam sistem pedesaan guna membuka pengertian dan pemahaman masyarakat. Tidak bisa tidak akan terjadi perubahan, baik dalam perekonomian, sosial, pemenuhan fasilitas dan yang lainnya, yang mengarah pada perbaikan sosial. Perlu dipertanyakan, apakah perbaikan sosial selalu sebagai suatu perubahan sosial; dan sebaliknya, suatu perubahan sosial; dan sebaliknya, suatu perubahan sosial berimplikasi pada terjadinya perbaikan sosial.

2. Faktor Penyebab Perubahan

a. Ekonomi Moral Petani

Pendekatan ini menyebutkan bahwa pada dasarnya petani hidup dalam desa tertutup, lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga secara subsistensi. Memiliki prinsip dahulukan selamat dan lebih suka meminimumkan kemungkinan terjadinya satu bencana, daripada memaksimumkan penghasilan rata-ratanya, ini sesuai dengan prinsip moral ekonomi orang miskin.

Bila mereka mengalami krisis dalam panen dan penghasilan mereka, maka untuk dapat bertahan ada berbagai cara ditempuh, seperti mencoba berusaha dibidang lain, lebih mengencangkan ikat pinggang, dan bila tetap berlanjut krisis tersebut, maka mereka akan mencoba minta bantuan dari saudara/orang lain sebagai pelindung. Yang dalam hal ini disebut sebagai patron, dan mereka sebagai klien yang mempunyai kedudukan lebih lemah (Scott, 1981).

Lebih jauh petani di pedesaan memang digambarkan memiliki sifat yang demikian. Sehingga perubahan yang terjadi sungguh lambat. Desa digambarkan sebagai tempat yang cenderung statis kalau tidak dapat dikatakan tertutup. Sehingga menurut pakar ekonomi moral, perubahan hanya akan terjadi bila petani merasa mengalami ancaman keamanan, subsistensi dan kesejahteraannya.

Dapat berupa tekanan dari pihak atas, hancurnya ikatan komuniti moral petani, masuknya peraturan-peraturan dan komersialisasi.

Namun moral ekonomi petani bukanlah sebagai tatanan moral masyarakat yang berorientasi pada penilaian normatif. Moral ekonomi petani adalah refleksi perhitungan untung-rugi petani atas suatu perilaku okupasinya. Namun demikian, secara sosiologis dalam lingkungan masyarakat tradisional, seseorang tidak akan secara ekstrem berperilaku berbeda dari orang-orang dilingkungan komunitasnya.

Begitu pula dalam inovasi kelembagaan, misalnya dengan kehadiran KUD di pedesaan, petani tidak akan berpartisipasi di dalamnya, agar hubungannya dengan patron tidak terputus. Padahal keamanan subsistennya dipelihara oleh patron. Memutuskan hubungan dengan patron berarti pula menciptakan kerawanan subsistensi. Dimana menurut faham ini, revolusi hijau dan komersialisasi di pedesaan tidak akan mencapai keberhasilan, malah hanya merusak tanaman-tanaman mapan yang selama ini menjamin harmoni sosial-ekonomi komunitas.

b. Ekonomi Politik Petani

Menurut ahli ekonomi politik ini, bahwa dalam langkahnya petani secara individual mengambil keputusan untuk mengadopsi beberapa norma dan menolak norma-norma lainnya yang disebut sebagai norma pemaesa.

Samuel L. Pookin menyatakan bahwa sebenarnya petani adalah rasional. Bila berhubungan dengan pasar, mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan adaptasi, sehingga perilakunya bisa kondusif bagi prinsip-prinsip ekonomi pasar, seperti tindakan investasi dan efisiensi. Dimana dia tidak setuju hubungan patron-klien dan kegotong-royongan yang menciptakan harmoni dan jaminan subsistensi komunitas terlalu diromantisasi.

Semua desa pada saat ini tidak ada yang masih tertutup, namun yang paling penting adalah bahwa, menurut mereka perubahan terjadi karena petani mempunyai keinginan untuk maju dari satu tingkat ke tingkat yang selanjutnya.

Sumber-sumber perubahan sosial ini menurut Mac Iver dan Page mencakup lingkup biologi, teknologi dan ideologi masyarakat. Lingkup teknologi dapat merupakan penemuan teknologi maupun perbaikan cara-cara produksi. Sedangkan ideologi masyarakat dapat disebabkan masuknya sistem baru kedalam stabilitas masyarakat tersebut.

Sehingga terjadinya perubahan sosial di pedesaan dari dua pendekatan yang dikemukakan di atas adalah disebabkan masuknya sistem baru ke dalam stabilitas masyarakatnya. Chambers (1987), juga mendukung bahwa perubahan disebabkan oleh berperannya outsider (orang luar) dan akibat kemajuan sarana komunikasi.

V. PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT DARI PEMBANGUNAN INDUSTRI DI PEDESAAN

1. Pengaruh Terhadap Kesempatan Kerja

Kini mulai disadari pentingnya sektor non pertanian sebagai salah satu alternatif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sekelompok besar masyarakat pedesaan, khususnya kelompok buruh tani dan petani sempit, terutama dalam penyerapan tenaga kerja (Mubyarto, 1985). dalam hal ini sektor industri menjadi salah satu pilihan. Dimana kebijaksanaan pengembangan industri diantaranya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan yang lainnya, yang pada akhirnya akan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada masa yang akan datang.

Pada kenyataannya telah terjadi pergeseran kontribusi pertanian terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, baik di kota dan di desa. Akhir-akhir ini perhatian terhadap pembangunan industri di desa menjadi penting. Menurut White (1990) ada faktor keunggulan bila industri berlokasi di desa; sekaligus pasar bagi produk, kemudahan memperoleh bahan baku, tenaga kerja murah, untuk industri "kotor" (*pencemaran*). Industri di pedesaan baik dalam unit-unit kecil dan rumah tangga atau pun dalam pabrik-

pabrik besar, akan dapat menampung sebagian tenaga kerja menganggur, dan yang setengah menganggur atau yang pendapatannya kurang (Rahardjo, 1984).

Tabel 2. Kesempatan Kerja dan Domestik Bruto menurut Sektor 1971, 1980, 1985 (%)

| S e k t o r | 1971 | | 1980 | | 1985 | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | TK | PDB | TK | PDB | TK | PDB |
| Pertanian | 67.0 | 38.8 | 56.3 | 24.6 | 54.0 | 24.2 |
| Non Pertanian | 33.0 | 66.2 | 43.7 | 75.4 | 45.3 | 75.8 |
| T o t a l | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Industri | 21.0 | 9.4 | 20.9 | 14.5 | 20.5 | 16.7 |
| Non Industri | 79.0 | 90.6 | 79.1 | 85.5 | 79.5 | 83.3 |

Sumber: BPS, 1990

Dapat dilihat bahwa proporsi kesempatan kerja dan pendapatan di sektor pertanian semakin menurun, yang disebabkan makin banyaknya orang yang berpindah ke sektor non pertanian. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai sebab, oleh Sawit dalam Mubyarto (1985) mengatakan itu terjadi akibat dari:

- (a) Tidak cukupnya pendapatan di usahatani, misalnya karena luas usahatani sempit-sempit, sehingga diperlukan tambahan pendapatan.
- (b) Pekerjaan dan pendapatan di usahatani umumnya amat musiman, sehingga diperlukan waktu menunggu yang relatif lama sebelum hasil/pendapatan bisa dinikmati. Dalam situasi demikian peranan pekerjaan yang memberikan pendapatan di luar pertanian amat besar.

- (c) Usahatani banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, misalnya panen gagal atau produksi amat merosot/rendah seperti serangan hama penyakit, kekeringan dan banjir, oleh karena itu diperlukan pekerjaan/pendapatan cadangan guna mengatasinya.

Pada tabel 2. jelas terlihat bagaimana akibat dari pergeseran-pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian ke non pertanian tersebut, baik dari sumbangan terhadap PDB maupun dalam kesempatan kerjanya. Proporsi kesempatan kerja pada non pertanian terlihat makin meningkat dari 33.0% pada tahun 1971 menjadi 43.7% pada tahun 1980 dan 45.3% di tahun 1985. Sedangkan harapan untuk menampung tenaga kerja yang masih banyak menganggur ada pada sektor non pertanian yang memang semakin meningkat, demikian juga kontribusinya pada PDB.

Sektor industri adalah salah satu sektor harapan akan mampu menampung tenaga kerja yang berpindah atau yang tidak dapat diterima di sektor pertanian, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Meskipun produktivitasnya yang memberi sumbangan semakin besar terhadap pendapatan nasional tetapi ada kecenderungan bahwa penyerapan tenaga kerjanya tidak sebanding dengan pendapatannya. Ini berarti industri belum bisa diandalkan sepenuhnya sebagai sektor yang mampu menampung tenaga kerja (Juoro, 1983).

Masuknya industri di pedesaan karena berbagai faktor tersebut di atas sedikit banyak akan mempengaruhi desa setempat dan sekitarnya. Dalam ketenagakerjaan misalnya, kesempatan kerja di industri akan pula menyebabkan perubahan. Ada anggapan bahwa pertanian merupakan pekerjaan yang rendah dan kurang bergengsi, sedangkan pekerjaan di luar pertanian termasuk industri lebih bergengsi dan mereka percaya bahwa pendapat pun akan lebih tinggi bila bekerja di industri. Pikiran seperti ini lebih cenderung dimiliki oleh kaum muda di desa, sedangkan yang tua masih bertahan di pertanian karena merasa lebih paham dan bahkan adalah cara hidupnya yang tidak akan pernah ditinggalkannya.

Modernisasi tampaknya tidak selalu seperti yang diagungkan, dimana modernisasi dapat menyebabkan hancurnya sistem lama yang tidak ingin dilepaskan, dan masuknya kebudayaan baru yang mungkin lebih merugikan. Bila kita lihat secara cermat, masuknya teknologi baru pada pertanian menyebabkan pekerja wanita merasa dirugikan. Perubahan ani-ani menjadi sabit, sistem bawon menjadi sistem tebasan, dan masuknya *huller* menyebabkan kesempatan kerja untuk wanita semakin sempit (Pudjiwati Sajogyo, 1985). Walaupun pada kenyataannya teknologi ini semakin mempertinggi efisiensi kerja. Ini salah satu faktor yang menyebabkan bergesernya wanita bekerja dari pertanian ke non pertanian.

Sedangkan pada industri, baik industri besar, sedang dan kecil ada kecenderungan lebih banyak menampung tenaga kerja wanita dan anak-anak, karena tingkat upah mereka lebih rendah. Sementara untuk pria kesempatan bekerja di industri semakin rendah. sektor non pertanian yang lebih banyak dimasuki pria adalah jasa, perdagangan, transportasi, bangunan, listrik dan yang lainnya (Mubyarto, 1985).

2. Pengaruh Terhadap Pendidikan

Dari yang diketahui selama ini tenaga kerja sangat berlimpah sedangkan lapangan kerja adalah sedikit, menyebabkan makin banyaknya pengangguran. Namun perlu diketahui bahwa yang berlimpah tersebut umumnya adalah tenaga kerja yang kurang terampil.

Masalah kesempatan kerja di pedesaan tidak dapat dianalisa secara tersendiri karena masalah tersebut berhubungan erat dengan masalah rendahnya pendapatan dan masalah kemiskinan. Dan pendapatan seseorang tergantung dari curahan waktu dan tingkat pendapatan per jam yang diterima. Adapun tingkat pendapatan per jam yang diterima dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau ketrampilan dan sumber-sumber bukan tenaga yang dikuasai. Lebih jauh menurut Mubyarto, makin tinggi pendidikan atau

ketrampilan dan makin besar sumber non tenaga yang dikuasai, makin tinggi pendapatan per satuan waktu yang diterima.

Sementara yang terlihat bahwa ketrampilan tenaga-tenaga muda masih kurang, penyebab utama meningkatnya pengangguran dan ini harus dikaitkan dengan pendidikan formal yang mereka terima, bahkan lulusan sekolah kejuruanpun seringkali harus diberi pendidikan ketrampilan tambahan oleh perusahaan yang memberinya pekerjaan.

Tetapi menurut pendapat Kasryno dan Stepanek (1985), yang harus diperhatikan tidak hanya pendidikan formal juga pendidikan non formal, yang dibeda-bedakan apakah pada anak kecil, pemuda dan orang dewasa, termasuk gadis-gadis putus sekolah guna memperoleh pendidikan dan ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekerja. Dimana sasaran utamanya adalah keluarga petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Pernyataan tersebut didukung pula oleh data BPS (1993) mengatakan bahwa, ketrampilan tidak semata-mata diperoleh dari pendidikan formal, tetapi melalui keluarga atau teman-teman dan mencari sendiri melalui pengalaman.

Tabel 3. Persentase Jumlah Pekerja yang Tidak Pernah/belum Sekolah dan Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar menurut Kegiatan Ekonomi di Wilayah Kota dan Desa.

| No. | Sektor Kegiatan | Kota | Desa | Indonesia |
|-----|-----------------|------|------|-----------|
| 1. | Pertanian | 73.7 | 77.5 | 77.2 |
| 2. | Industri | 38.6 | 71.6 | 61.5 |
| 3. | Lainnya | 39.2 | 59.3 | 51.3 |

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka tingkat ketrampilan dan pendidikan sangat mempengaruhi kesempatan kerja yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan. Pada tabel 3 kenyataan menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tidak/belum pernah sekolah bekerja pada sektor yang hanya membutuhkan tenaga. Pertanian adalah salah satu lahan pertanian yang pada umumnya tidak membutuhkan ketrampilan dan pendidikan, sebab yang bekerja pada pertanian lebih cenderung sebagai turunan.

Sedangkan untuk bekerja disektor non pertanian, khususnya industri cenderung membutuhkan ketrampilan dan pendidikan tertentu. Maka diharapkan kaum muda terlebih yang di pedesaan untuk semakin sadar akan kebutuhan pendidikan dan ketrampilan guna menunjang masa depannya.

Bila telah terjadi pembangunan di suatu daerah, akan terlihat perubahan lain yang terjadi. salah satu yang sudah lazim terjadi adalah pembangunan otomatis akan membawa dampak pada perubahan pendidikan. Yang dimaksud dengan perubahan pendidikan adalah, tingkat keinginan dan kesadaran untuk meraih pendidikan akan semakin tinggi. Ini dipengaruhi oleh fenomena yang terlihat bahwa pembangunan dan sektor modern yang umumnya dituju oleh masyarakat membutuhkan orang-orang yang berpendidikan. Umumnya golongan berpendidikan ini akan menjadi orang yang dipandang di dihormati terlebih di desa. Membawa perubahan pula dalam statusnya dalam masyarakat.

VI. PENUTUP

Pembangunan pertanian di Indonesia selama ini telah menempatkan posisi kelas ekonomi, kekuasaan politik dan status soaial anggota masyarakat pada ketimpangan yang cukup berarti. "*Revolusi hijau*" telah menciptakan perubahan yang cukup besar dalam usahanya memacu pertumbuhan produksi pertanian dan mempercepat perubahan sosial di pedesaan.

Sedangkan pembangunan industri semakin mendapat perhatian, karena dari hasil pengamatan, sektor ini makin meningkat peranannya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Sementara disisi lain, sektor pertanian mengalami penurunan, meski tetap merupakan sektor yang terbesar dalam memberi kontribusi bagi pendapatan negara.

Maka pada PJPT II ini, strategi pembangunan dititikberatkan pada pengembangan ekonomi dimana sektor industri menjadi tumpuan utama dan menunjang pertanian yang tangguh menuju peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata.

Pembangunan industri tidak hanya menunjang pertanian, tetapi juga mampu menampung tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan rakyat. Bahkan pembangunan industri ini sebenarnya cakupannya luas yang mendorong dan memacu perkembangan semua aspek-aspek terkait. Sehingga perkembangannya tidak selalu di kota namun juga diarahkan ke wilayah pedesaan guna peningkatan pertanian dan pendapatan rakyat. Bila industri memasuki wilayah pedesaan, otomatis membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat setempat, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Industri di desa sejak dulu merupakan industri kecil, yang menghasilkan perlengkapan dalam mencari kebutuhan hidup seperti untuk bertani, juga menghasilkan bahan pakaian dan perlengkapan-perengkapan yang lain. Sektor kecil ini menyerap tenaga kerja yang besar karena tersebar di seluruh wilayah pedesaan Indonesia. Karena hanya membutuhkan tenaga kerja yang sedikit trampil yang biasanya ketampilannya di dapat dengan belajar langsung ditempat.

Namun dulunya penduduk pedesaan hanya mengerjakan lahan pertanian sebagai sumber mata pencahariannya maka kini dengan masuknya industri mereka dapat bekerja disana. Bahkan juga dapat bekerja di sektor jasa yang hadir seiring dengan masuknya industri. Kesempatan seperti ini yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri di pedesaan, yang mampu juga mencegah urbanisasi yang membawa masalah diperkotaan.

Upaya peningkatan pendidikan di pedesaan yang selama ini sangat rendah juga akan mampu meningkat dengan masuknya industri. Otomatis wilayah tersebut akan membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan. Dimana kesempatan kerja sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan meningkat pula kesempatan kerja yang didapat, terlebih tenaga trampil yang dibutuhkan.

begitu pula dengan pendapatan yang diterima, tingkat pendapatan perjam sangat ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki dan ketrampilan yang dimiliki. Sehingga dengan adanya industri di pedesaan akan meningkatkan semangat meraih pendidikan guna meningkatkan pendapatan dan status sosial penduduk di sekitarnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. 1985. Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. Penerbit BPEF. Yogyakarta.
- Geertz, Clifford. 1974. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Penerbit Bhratara Jakarta. (diterjemahkan oleh Supomo)
- Rahardjo, Dawam. 1984. Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan kesempatan kerja. Penerbit UI-Press. Jakarta.
- Reid, Anthony. 1987. Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Penerbit Pustaka Sinar harapan. Jakarta.
- Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Subsisten di Asia Tenggara. Penerbit LP3ES. Jakarta
- Sayogyo. 1990. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Rangka Industrialisasi. Penerbit Sekinda Eka jaya. Jakarta (Simposium Industrialisasi Pedesaan di IPB Bogor).
- Sayogyo, Pudjiwati. 1985. Teknologi Pertanian dan Perluasan Kerja Winita di Pedesaan: Suatu Kasus padi Sawah. Penerbit BPEF. Jogjakarta
- Salman, Darmawan. 1995. Arah Perubahan Sosial di Pedesaan Pasca Revolusi Hijau. Analisis CSIS, No.1, Jakarta.
- Popkin, Samuel L. 1986. Petani Rasional. Penerbit Yayasan Padamu Negeri. Jakarta
- Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Juoro, Umar. 1983. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, Bukan Kawan Seiring?. Prisma No.11/12 th.XII, NOV/Des 1983. Jakarta Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Kasryno dan Stepanek. 1985. Dinamika Pembangunan Desa. Penerbit Gramedia. Jakarta.

Hasibuan, Nurimansyah. 1990. Industrialisasi Pedesaan Luar Jawa. 80581.pdf
Kondisi Kerja dan Prospek. Penerbit Sekinda Eka Jaya.
Jakarta.

Ariwibowo, Tungki. 1994. Kebijakan Industri Pada PJPT II.
Makalah dalam Seminar Dua Hari Sumber Daya Manusia Dan
Industri Pada Tanggal 17 Januari 1994. Universitas
Pakuan Bogor. Bogor.

Hartato. 1991. Pengusaha Kecil Berperan Banyak. Pengusaha
Indonesia Tahun II No.5. Jakarta.

Departemen tenaga Kerja. 1993a. Laporan Tahunan 1993. Depnaker.
Jakarta.

Pelzer, Karl J. 1985. Toen Keboen dan Petani. Politik Kolonial
dan Perjuangan Agraria. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.

UNIVERSITAS TERBUKA